



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA

2024

DLH KAB. SUKABUMI

Jl. Jendral Sudirman,
Komp.Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu
Telp : (0266) 436428
Email : blh@sukabumikab.go.id
Website : dlh.sukabumikab.go.id



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 00.7-2.6 / Kep.249 - DLH / 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar wilayah, antar ruang dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran diperlukan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 77);
 23. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).

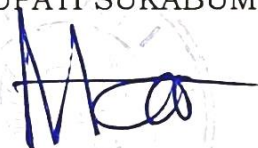
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
 - b. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024; dan
 - c. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.
- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Maret 2023
BUPATI SUKABUMI


MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 00-7.2.6 /Kep. 244 - DLH /2023

TANGGAL : 3 Maret 2023

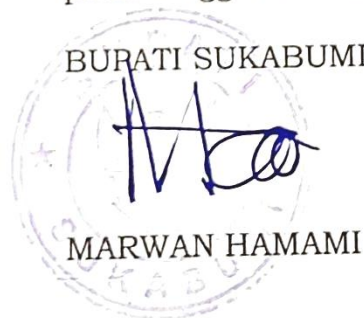
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 3. Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
 5. Kepala Sub Bagian di Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 6. Jabatan Fungsional Sub Koordinator seluruh Bagian dan Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 7. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
 8. Unsur Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI SUKABUMI



MARWAN HAMAMI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi 2024 ini dengan baik dan lancar.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai acuan/arahan kerangka kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Demikian rencana kerja ini disusun. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palabuhanratu, 21 Juli 2023



KEPALA,

Ir. Hj. TEJA SUMIRAT, M.M

Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19660330 199303 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	10
HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN LALU	10
BAB III	62
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB IV	72
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH.....	72
BAB V	94
PENUTUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedua dokumen saling terkait serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RKPD 2024 Kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renstra Kabupaten Sukabumi diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Penyusunan Renja mendorong dapat kebijakan perangkat daerah untuk membuat formulasi dan implementasi serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya akselerasi program pembangunan untuk mewujudkan tema/fokus pembangunan pada “Pemantapan daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur daerah”. Konsep pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi

kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian perlu adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan konkrit sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja DLH Kabupaten Sukabumi 2024 berlandaskan:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 30) Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 114);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaal Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13)
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- 38) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 77);
- 39) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3);
- 40) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 41) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00.7.2.6/Kep.249-DLH/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

- a. sebagai penjabaran tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju;
- b. sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

- a. terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. untuk memudahkan penilaian dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja DLH dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA DLH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra DLH merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022, dan perkiraan capaian Renja DLH Tahun 2023. Capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2023, kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan akan sesuai dengan target rencana.

a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra DLH merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu 2023 yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis DLH Kabupaten Sukabumi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100	100		100	100		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang disusun	70	4		4	100		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	1		1	100		
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3		3	100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun	4	1		1	100			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	82		82	100			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana Prasarana Pendukung Pengadministrasian Umum Yang disediakan	11	4		4	100			
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	45	5		5	100			
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	125	3		3	100			
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Yang disediakan	25	2		2	100			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12		12	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang disediakan	4	2		2	100			
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	9		9	100			
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	133	109		109	100			
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang dipelihara	12	3		3	100			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115	20		20	100			
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	4		4	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	1		1	100			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun Setiap Tahun	100	100		100	100			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH	3	1		1	100			
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota Yang disusun	2	1		1	100			
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	3	2		2	100			
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1	2		2	100			
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Presentase Titik Pantau Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang	71	58		58	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
					KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sesuai Baku Mutu								
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Mutu Air Sungai dan Udara	20	17		17	100			
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	40	31		31	100			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	5	1		1	100			
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Conto Uji, Pengjian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	3250	488		488	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang ditanggulangi	20	17		17	100			
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	20	17		17	100			
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang dipulihkan	20	17		17	100			
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	5	17		17	100			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang dikelola	10	10		10	100			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah KEHATI yang terkelola	3	0		0	0			
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	4	0		0	0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola	1,73	1,73		1,2	69,36			
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS LB3 yang disetujui	100	25	20	43	100			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	100	15		15	100			
2		06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Pengawasan Rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan	4,33	4,7		1,4	29,79			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi	160	132		132	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
					PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	500	60		60	100			
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	92		92	100			
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	100	100		100	100			
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan	Jumlah MHA Yang dibina	2500	50		50	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
					Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA Yang Terkait Dengan PPLH									
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA Terkait Dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Pendampingan dan Penguatan	3	1		1	100			
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	5	2,5		2,5	100			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Individu/Kelompok Masyarakat yang di didik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan	1250	125		125	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Yang dilaksanakan	45	4		4	100			
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	1,2	1,2		1,2	100			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Penghargaan Lingkungan yang diberikan	5	2		2	100			
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15	8		8	100			
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	90	100		68	68			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan	Jumlah Pengaduan Yang ditangani dan diselesaikan	135	41		14	34,15			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
					dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti/ditangani	135	41		14	34,15			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengelolaan Samah Pada Wilayah yang ditangani	70,4	54,40		46,02	84,60			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikelola Pada Wilayah Pelayanan	1472,36	1380		1380	100			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	945,4	427,79938		428	100			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif Dalam Kegiatan	25	3		3	100			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Indikator Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4
						Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat								
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota Untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai Dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu Pada Jakstrada	13	0		0	0			
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Penilaian Pengumpulan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2400	0		0	0			

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 31.104.580.265,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.272.747.847 atau 94,11%. Terdapat 11 Program yang dilaksanakan oleh DLH Tahun 2022, yaitu terdiri dari 1 Program urusan penunjang dan 10 Program urusan lingkungan hidup. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah didukung dengan 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan. Urusan Lingkungan Hidup didukung oleh 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.668.602.770,00	14.492.310.136,00	98,80
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.850.750,00	31.848.550,00	99,99
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.542.250,00	16.540.050,00	99,99
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.308.500,00	15.308.500,00	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.770.310.280,00	9.762.449.953,00	99,92
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.770.310.280,00	9.762.449.953,00	99,92
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.387.540,00	377.232.278,00	98,39
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.212.290,00	172.089.150,00	98,78
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.547.250,00	45.948.800,00	92,74
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000,00	53.880.000,00	99,78
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.628.000,00	105.314.328,00	99,70
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.780.284.200,00	3.643.889.121,00	96,39
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.040.000,00	178.633.391,00	73,80
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.538.244.200,00	3.465.255.730,00	97,94
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.770.000,00	676.890.234,00	96,32
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.480.000,00	389.164.184,00	94,58

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.290.000,00	89.888.500,00	98,46
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	197.837.550,00	98,92
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	88.600.000,00	87.032.700,00	98,23
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.140.900,00	96,82
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.140.900,00	96,82
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	61.600.000,00	60.891.800,00	98,85
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	61.600.000,00	60.891.800,00	98,85
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.593.778.000,00	287.040.250,00	18,01
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.548.500.000,00	243.924.900,00	15,75
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.383.000.000,00	80.304.000,00	5,81
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.500.000,00	7.120.900,00	94,95
c	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	158.000.000,00	156.500.000,00	99,05
B	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25.750.000,00	24.822.750,00	96,40
a	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.750.000,00	24.822.750,00	96,40
C	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	19.528.000,00	18.292.600,00	93,67
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	19.528.000,00	18.292.600,00	93,67
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	65.000.000,00	63.233.601,00	97,28

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	65.000.000,00	63.233.601,00	97,28
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	65.000.000,00	63.233.601,00	97,28
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22.850.000,00	21.939.500,00	96,02
A	Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.850.000,00	21.939.500,00	96,02
a	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.850.000,00	21.939.500,00	96,02
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.000.000,00	38.775.660,00	96,94
A	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	38.775.660,00	96,94
a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15.000.000,00	14.162.400,00	94,42
b	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.613.260,00	98,45
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20.000.000,00	19.377.500,00	96,89
A	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	20.000.000,00	19.377.500,00	96,89
a	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	20.000.000,00	19.377.500,00	96,89
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
a	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.655.000,00	19.824.350,00	95,98
A	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.655.000,00	19.824.350,00	95,98
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.655.000,00	19.824.350,00	95,98
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000,00	39.922.500,00	99,81
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.922.500,00	99,81
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.922.500,00	99,81
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.529.594.495,00	14.187.791.650,00	97,65
A	Pengelolaan Sampah	14.529.594.495,00	14.187.791.650,00	97,65
a	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.257.606.495,00	13.928.325.850,00	97,69
b	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	11.000.000,00	9.626.900,00	87,52
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	260.988.000,00	249.838.900,00	95,73

Rincian capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
						31.104.580.265	29.272.747.847
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase responden yang mendapat pelayanan urusan lingkungan hidup	%	100	84	14.668.602.770	14.492.310.136
2,01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun</i>	<i>dok</i>	4	4	31.850.750	31.848.550
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16.542.250	16.540.050
		Dokumen Renja 2023	dok	1	1		
		Dokumen Renja Perubahan 2022	dok	1	1		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.308.500	15.308.500
		Laporan bulanan monitoring dan evaluasi	dok	1	1		
		Laporan bulanan progres kegiatan	dok	1	1		
	2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan triwulanan DAK sub bidang lingkungan hidup	dok	1	1		
		<i>Dokumen administrasi keuangan yang disusun</i>	<i>dok</i>	1	1	9.770.310.280	9.762.449.953
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percepatan Gaji	Paket	1	1	9.770.310.280	9.762.449.953
		Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	83	82		
2,06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Sarana prasarana pendukung pengadministrasian umum yang disediakan</i>	<i>jenis</i>	4	4	383.387.540	377.232.278
	1 Penyediaan Peralatan dan						

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Perlengkapan Kantor					174.212.290	172.089.150
		Pengadaan Materai	Buah	300	300		
		Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer	Unit	2	2		
		Pengadaan Printer	Unit	2	2		
		Pemeliharaan AC	Unit	8	8		
		Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	Paket	1	1		
		Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan	Paket	1	1		
		Pengadaan ATK	Paket	1	1		
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					49.547.250	45.948.800
		Barang cetak	Paket	1	1		
		Belanja Penggandaan	Lembar	10.085	10.085		
		Cetak Spanduk	Meter	190	190		
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					54.000.000	53.880.000
		Belanja Langgaran Korang	Bulan	12	12		
		Tagihan Surat Kabar / Majalah	Bulan	12	12		
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					105.628.000	105.314.328
		Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	org	47	47		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum yang disediakan	jenis	2	2	3.780.284.200	3.643.889.121
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					242.040.000	178.633.391
		Tagihan jasa fax/internet yang dibayar	bln	12	12		
		Tagihan jasa telepon yang dibayar	bln	12	12		
		Tagihan jasa air yang dibayar	bln	12	12		
		Tagihan jasa listrik yang dibayar	bln	12	12		
		Langganan lisensi zoom meeting pro	T	1	1		
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.538.244.200	3.465.255.730
		Pembayaran iuran jaminan kesehatan (95 orang)	bln	12	12		
		Pembayaran honorarium jasa pengajian aparatur	bln	12	12		
		Pembayaran iuran jaminan kecelakaan dan kematian kerja (109 orang)	bln	12	12		
		Pembayaran honorarium jasa non pns penunjang pelayanan kantor (109 orang)	bln	13	13		
		Pembayaran sewa gedung kantor	T	1	1		
2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara	jenis	3	3	702.770.000	676.890.234
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					411.480.000	389.164.184
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang	Unit	1	1		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		dipelihara					
		Bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas roda empat untuk 6 unit yang disediakan	bln	12	12		
		Penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas roda dua (14 unit)	bln	12	12		
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					91.290.000	89.888.500
		Jasa pemeliharaan kendaraan operasional roda empat dan roda dua	Unit	2	2		
		Penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan operasional roda empat (2 unit)	bln	12	12		
		Penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan operasional roda dua (2 unit)	bln	12	12		
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000	197.837.550
		Jasa konsultan pengawasan rehab gedung	pkt	1	1		
		Jasa konsultan perencanaan rehab gedung	pkt	1	1		
		Jumlah gedung yang direhabilitasi	pkt	1	1		
		Alat penyimpan perlengkapan kantor	unit	12	12		
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	88.600.000	87.032.700
2,01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH	dok	1	1	27.000.000	26.140.900

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Kabupaten/Kota						
	1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					27.000.000	26.140.900
		Dokumen IKPLHD	dok	1	1		
		Peserta rakor penyusunan Kajian DIKPLHD	org	25	25		
2,02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	dok	2	2	61.600.000	60.891.800
	1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang					61.600.000	60.891.800
		Persetujuan Validasi KLHS	dok	2	2		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	1.593.778.000	287.040.250
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,94	89,68		
2,01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu air sungai dan udara	lok	17	17	1.548.500.000	243.924.900
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					1.383.000.000	80.304.000
		Alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo)	unit	1	0		
		Dokumen indeks kualitas air	dok	1	1		
		Dokumen indeks kualitas udara	dok	1	1		
		Jumlah lokasi pemantauan	lok		7		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		kualitas air sungai		7			
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambien	lok	10	10		
	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					7.500.000	7.120.900
		Identifikasi dan inventarisasi lokasi program kampung iklim	lok	11	11		
		Peserta rapat koordinasi pengendalian emisi gas rumah kaca	org	25	25		
	3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					158.000.000	156.500.000
		Pelayanan pengujian kualitas lingkungan	lok	21	21		
		Pemeliharaan peralatan dan instrumen pengujian laboratorium	unit/th	1	1		
		Pengadaan bahan kimia (reagen)	pkt	1	1		
	2,02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditanggulangi	lok	17	17	25.750.000	24.822.750
	1 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					25.750.000	24.822.750
		Identifikasi lokasi penghentian pencemaran	kec	21	21		
		Sosialisasi mekanisme penghentian pencemaran	org	20	20		
2,03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	lok	17	17	19.528.000	18.292.600

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar					19.528.000	18.292.600
		Identifikasi lokasi pembersihan unsur pencemar	lok	20	20		
		Peserta rapat pembahasan pembersihan unsur pencemar	org	20	20		
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKT)	Poin	54,48	46,42	65.000.000	63.233.601
2,01	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Jumlah kehati yang dikelola	lok	2	0	65.000.000	63.233.601
	1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					65.000.000	63.233.601
		Monitoring dan evaluasi kehati	lok	2	2		
		Partisipan pameran promosi Kehati	org	45	45		
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	22.850.000	21.939.500
2,01	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah TPS LB3 yang disetujui</i>	unit	20	43	22.850.000	21.939.500
	1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3					22.850.000	21.939.500
		Jumlah peserta sosialisasi teknis penyimpanan sementara limbah b3	org	20	20		
		Verifikasi lapangan pengajuan penyimpanan sementara LB3	lok	20	43		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	40.000.000	38.775.660
2,01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi</i>	usaha/ kegiatan	140	133	40.000.000	38.775.660
	1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					15.000.000	14.162.400
		Jumlah ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin pplh yang terpenuhi	usaha	70	41		
	2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000	24.613.260
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang di awasi	usaha	70	92		
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,94	89,68	20.000.000	19.377.500
2,02	<i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	<i>Jumlah MHA yang dibina</i>	org	50	50	20.000.000	19.377.500
	1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak					20.000.000	19.377.500

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	org	50	50		
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKT)	Poin	54,48	46,42	15.500.000	15.500.000
2,01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah individu/kelompok masyarakat yang dididik, dilatih dan mendapatkan penyuluhan lingkungan</i>	org	125	125	15.500.000	15.500.000
	1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					15.500.000	15.500.000
		Peserta bimbingan teknis pengelolaan lingkungan	org	35	35		
		Peserta bimbingan teknis penyusunan profil calon sekolah adiwiyata	sklh	20	20		
		Peserta pembinaan/gerakan peduli lingkungan untuk saka kalpataru	org	35	35		
		Peserta sosialisasi sekolah berbudaya lingkungan	org	35	35		
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	20.655.000	19.824.350
2,01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kategori penghargaan lingkungan yang diberikan</i>	kategori	2	2	20.655.000	19.824.350
	1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam					20.655.000	19.824.350
		Jumlah penghargaan lingkungan yang diberikan	buah	8	6		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peserta pemberian penghargaan sekolah adiwiyata dan properda tingkat kabupaten sukabumi	org	60	60		
		Peserta rapat penentuan akhir penilaian Sekolah Adwiyata Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2022	org	15	15		
		Verifikasi lapangan penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten	lok	15	15		
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	58,87	50,48	40.000.000	39.922.500
2,01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan</i>	<i>pengaduan</i>	20	41	40.000.000	39.922.500
	1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang dikelola	kasus	20	41	40.000.000	39.922.500
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	54,40	40,91	14.529.594.495	14.187.791.650
2,01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Jumlah sampah yang dikelola pada wilayah pelayanan</i>	<i>m3</i>	1.138	1.380	14.529.594.495	14.187.791.650
	1 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					14.257.606.495	13.928.325.850
		Aki (accu) kendaraan operasional persampahan	bh	122	122		
		Suku cadang kendaraan roda 3 operasional persampahan	pkt	1	1		
		Suku cadang excavator	pkt	2	2		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Honorarium tenaga organik persampahan (270 orang)	h	293	326		
		Pelumas (gemuk) kendaraan operasional persampahan	ltr	620	620		
		Mesin press hidrolik	unit	1	1		
		BBM operasional persampahan	ltr	394.500	394.500		
		Suku cadang alat berat operasional persampahan	pkt	2	2		
		Landfill TPA Cimenteng	pkt	1	1		
		Suku cadang kendaraan roda 2 operasional persampahan	pkt	3	3		
		Kontainer sampah	unit	1	1		
		Ban kendaraan operasional persampahan	bh	384	384		
		Dokumen studi pengolahan sampah di TPA Cimenteng dengan teknologi tepat guna	dok	1	1		
		Jaring sampah	bh	51	51		
		Suku cadang kendaraan roda 4 operasional persampahan	pkt	5	5		
		Landfill TPA Kadaleman	pkt	1	1		
		Pelumas (oli) kendaraan operasional persampahan	ltr	9.900	9.900		
		Suku cadang kendaraan	pkt				

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		roda 6 operasional persampahan		5	5		
		Armroll truk sampah	unit	1	1		
	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan					11.000.000	9.626.900
		Bank sampah yang dibina	lok	20	20		
		Peserta sosialisasi pengelolaan persampahan	org	20	20		
		TPS3R yang dibina	lok	2	2		
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					260.988.000	249.838.900
		Tempat pembuangan sampah sementara (tpss) piramid	unit	31	31		
		Tempat sampah pilah 3	set	50	50		
		Tempat sampah pilah 4	set	50	50		

Rekapitulasi realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Uraian	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Anggaran Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu
BELANJA OPERASI	28.740.177.065	28.270.490.297	469.686.768,00	98,37%
Belanja Pegawai	9.770.310.280	9.762.449.953	7.860.327,00	99,92%
Belanja Barang dan Jasa	18.969.866.785	18.508.040.344	461.826.441,00	97,57%
BELANJA MODAL	2.364.403.200	1.002.257.550	1.362.145.650	42,39%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.126.203.200	765.464.000	1.360.739.200	36,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.000.000	168.937.550	1.062.450	99,38%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.200.000	67.856.000	344.000	99,50%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0		
TOTAL	31.104.580.265	29.272.747.847	1.831.832.418	94,11%

Pencapaian target kinerja sasaran DLH Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DLH Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Renstra DLH Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,85	65,47	97,94
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah yang Ditangani	%	54,40	40,91	75,20

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH tahun 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:

- a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah pengambilan contoh uji hanya 477 sampel dari target 550 sampel. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya regulasi turunan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengubah kewenangan perizinan berusaha dan belum terakreditasinya UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sukabumi.
- b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Anggaran untuk sub kegiatan ini direalokasi untuk Festival Mobil Bunga Hias dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-152, sebagai upaya promosi pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Sukabumi.
- c. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen AMDAL, UKL UPL, SPPL hanya 41 usaha/kegiatan dari target 70 usaha/kegiatan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengubah kewenangan perizinan serta skema pemenuhan Persetujuan Lingkungan, serta belum adanya sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sukabumi.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah yang Ditangani, kedua indikator tersebut tidak mencapai target pada Tahun 2022.

Pada Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hanya mendapatkan nilai 65,47 dari target 66,85. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pencegahan pencemaran belum maksimal dan masih banyak usaha/kegiatan

yang membuang sampah atau limbahnya ke sungai, serta belum banyak IPAL komunal untuk menangani limbah cair domestik. Banyaknya kendaraan bermotor juga mempengaruhi indeks kualitas udara. Indeks tutupan lahan dipengaruhi tutupan lahan di Kabupaten Sukabumi yang berubah dari hijau menjadi non hijau. IKLH terdiri dari komponen IKA, IKU, dan IKTL. Nilai ketiga komponen tersebut masih dibawah target. Hal ini karena kurangnya sumberdaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup melalui komponen air, udara, dan tanah.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pengendalian pencemaran atau meningkatkan IKLH diantaranya pelayanan Persetujuan Lingkungan yang sesuai regulasi dimana salah satu syarat Persetujuan Lingkungan yaitu Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air dan udara emisi serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal ini upaya untuk mengendalikan pencemaran dari sektor industri untuk tidak atau mengurangi pencemaran lingkungan. Upaya lain yaitu memberikan himbauan, peringatan, pengawasan regular, serta monitoring evaluasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pada indikator Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah yang Ditangani hanya terealisasi 40,91% dari target 54,40%. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukabumi, didasari dengan keterbatasan anggaran untuk melayani pengangkutan pengelolaan sampah di seluruh wilayah. Kegiatan pengangkutan sampah wajib mengalokasikan dana untuk angkutan, BBM, personil, yang mana hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu komponen tersebut tidak memenuhi maka pelayanan sampah akan terganggu. Persentase penanganan sampah tidak mencapai target karena jumlah timbulan sampah semakin meningkat sedangkan alat pengangkutan dan penanganan sampah di TPA tidak bertambah secara signifikan. Implikasi yang timbul terhadap tidak memenuhinya target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya tidak tercapainya Jakstrada, penumpukan sampah, dan tercemarnya lingkungan serta turunnya citra Kepala Daerah karena pengelolaan sampah menjadi sorotan berbagai pihak. Inovasi juga dilakukan dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Saat ini sedang melakukan proses tahapan kerjasama pengelolaan sampah di TPA Cimenteng untuk menjadi RDF.

Kerjasama juga dilakukan dengan pihak ketiga dalam penanganan sampah pasar menjadi produk yang bernilai ekonomis.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sub kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu:

a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Jumlah pengajuan penyimpanan sementara LB3 mencapai 43 usaha/kegiatan dari target 20 usaha/kegiatan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya sosialisasi kepada pelaku usaha/kegiatan sehingga sadar akan pentingnya penyimpanan limbah B3 yang sesuai standar.

b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi mencapai 92 usaha/kegiatan dari target 70 usaha/kegiatan. Hal ini karena dilakukan pengawasan dengan cara *self assesment* oleh pelaku usaha. Namun hal tersebut masih belum cukup, Pejabat Pengawas Lingkungan hidup perlu turun ke lapangan sesuai dengan regulasi untuk melakukan pengawasan. Namun karena keterbatasan anggaran, hanya *self assesment*.

c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Jumlah pengaduan yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 41 pengaduan dari target 20 pengaduan. Hal ini karena pengaduan diajukan oleh masyarakat yang merasa tidak nyaman, hal ini tidak dapat dikontrol oleh dinas karena diatur dalam regulasi. Setiap pengaduan sebisa mungkin ditangani dan diselesaikan. Peningkatan pengaduan masyarakat dapat mengindikasikan adanya ketidaknyamanan masyarakat terhadap lingkungan hidup atau adanya pelanggaran dari pelaku usaha/kegiatan. Hal ini harus memicu dinas lebih memperkuat pengawasan yang mana harus didukung oleh sumberdaya baik materil atau non materil.

Capaian target kinerja sasaran DLH Tahun 2022 terhadap Renstra DLH Tahun 2021-2026 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan yaitu pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 63,02 dari target 57,75. Berdasarkan variabel IKLH, hal ini dibantu oleh pencapaian Indeks Tutupan Lahan (IKTL) yang mana datanya didapat dari KLHK sedangkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dibawah target yang mana pengukuran hanya dilaksanakan satu semester padahal seharusnya dua semester serta meningkatnya aktivitas manusia yang membuang limbahnya ke sungai tanpa dilakukan pengolahan. Pencapaian melebihi target ini tidak boleh dimaknai sebagai kesuksesan pemerintah karena kualitas lingkungan sangat dinamis dan tergantung pada waktu sampling. Masih banyak kekurangan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu yang tidak disebutkan pada poin 1 dan 2 sebelumnya. Pemenuhan target tersebut didukung oleh kerja keras seluruh aparatur dengan keterbatasan anggaran serta memanfaatkan teknologi yang ada.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi pencapaian target sebagai berikut:

- Restrukturisasi perencanaan penganggaran Program/kegiatan/sub kegiatan yang ideal dan proporsional untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- Optimalisasi penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan berbagai pihak/stakeholders untuk menggali potensi program kegiatan yang mendukung pencapaian terget kinerja yang telah ditetapkan;
- Pemanfaatan teknologi digital untuk membantu pencapaian target;
- Adanya kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi mengacu pada Tujuan dan Sasaran dapat dituangkan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra DLH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota			57,75	66,85	67,41	68,11	63,02	65,47	67,41	68,11	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota			50,4	54,4	58,4	62,4	46,02	40,91	58,4	62,4	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten/kota dikali 100%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			14,29	12,5	11,11	10	0,79	1,09	11,11	10	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin pplh yang diterbitkan pemerintah kab/kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi Kabupaten Sukabumi 2021-2026,

yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan kompleksitas pengelolaan lingkungan antara lain yang berpengaruh pada pelayanan DLH dalam hal urusan Lingkungan Hidup. Pelayanan lingkungan hidup tidak hanya memikirkan untuk saat ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai UUD 1945 dan sejahtera lahir dan batin sesuai Visi Kabupaten Sukabumi, namun juga harus memikirkan kehidupan masyarakat di generasi mendatang. DLH sebagai unsur pemerintah dihadapkan dengan kewajiban untuk melindungi makhluk hidup baik biotik maupun abiotik dimana dalam pelaksanaan sangat membutuhkan sumberdaya dan terbatasnya kewenangan serta dinamika sosial politik masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Kurang kuatnya fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi;
- Masih adanya ego sektoral dari setiap instansi padahal lingkungan hidup cakupannya luas;
- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tidak sinkron / relevan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- Tidak adanya Peraturan Daerah yang spesifik dan aplikatif dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dinamika regulasi dan kebijakan yang terbaru;
- Kurangnya terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi;
- Penyusunan perencanaan dan realisasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang belum terarah secara cermat, serta kurangnya kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan oleh para *stakeholder* ;
- Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah jika permasalahan dan hambatan tidak ditanggulangi yaitu tidak tercapainya target sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 dan banyaknya pengaduan masyarakat, serta lingkungan tercemar yang mana dapat membuat citra buruk bagi kepala daerah. Dampak terhadap pencapaian program nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ditindaklanjuti di daerah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mana terdapat target pengurangan dan penanganan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan capaian pada tahun 2021 dan keterbatasan anggaran tahun 2022. Target pengurangan dan penanganan sampah sulit dicapai. Dampak terhadap pencapaian program nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mana terdapat indikator Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dampak terhadap pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) nomor 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan nomor 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DLH yaitu Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah geografis yang luas dengan sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki karakter masyarakat yang unik di setiap lokasi namun tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia yang peka terhadap isu lingkungan dan bertekad untuk membangun Kabupaten Sukabumi secara berkelanjutan, yang mana pembangunan masih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang masih peduli dan melakukan aksi nyata untuk menjaga lingkungan sehingga keberadaan masyarakat tersebut menjadi peluang untuk melakukan pelayanan dalam hal pembinaan terhadap masyarakat untuk mengelola lingkungan agar efeknya meluas. Masyarakat yang ikut andil dalam mengelola lingkungan dapat diberikan *reward and punishment* sebagai upaya adaptif menuju *sustainable mindset*. Potensi tutupan lahan yang masih luas yang dibuktikan dengan nilai IKLH yang cukup

tinggi menjadi peluang untuk Kabupaten Sukabumi untuk menerapkan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional untuk melakukan *Carbon Trading* sebagai kontribusi daerah untuk mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC) 29% penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat menjadi *income* juga bagi pemerintah daerah. Tantangan bagi pemerintah daerah yaitu perlu merumuskan formulasi yang tepat dan sinergitas perangkat daerah terkait. Era saat ini perkembangan teknologi meningkat dan upaya Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berpeluang untuk penyelenggaraan administrasi secara *paperless*. Saat ini surat menyurat, pelaporan, dan pengadministrasian lainnya masih konvensional dengan metode cetak dan penggandaan. Padahal, *life cycle* dari kertas sangat panjang dan membutuhkan energi yang banyak dan boros. Tantangan untuk pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diemban oleh DLH Kab. Sukabumi, perlu kiranya memperkuat kelembagaan melalui:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara profesional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan pengelolaan lingkungan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan kegiatan menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program

kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” untuk mengakomodir kebutuhan di lapangan atau di masyarakat.

3. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor seperti alokasi anggaran, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Melakukan sosialisasi, pengawasan, penataan dan penegakan hukum lingkungan dengan dibentuk Tim Monev DLH Kab. Sukabumi.
5. Menyusun draft/rancangan Peraturan Daerah beserta turunannya agar kebijakan sesuai perkembangan zaman serta aplikatif di lapangan.
6. Menerapkan Green Office lingkup DLH Kab. Sukabumi sebagai *pilot project* percontohan untuk mendorong instansi pemerintah memiliki kantor yang berwawasan lingkungan serta memotivasi masyarakat dengan aksi nyata tidak hanya sosialisasi.
7. Membentuk kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.
8. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan mensosialisasikan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan.

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan perbandingan antara rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. *Review* tidak dilaksanakan disebabkan dokumen dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak didistribusikan ke OPD namun secara ringkas *review* tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*

Program	Pagu RKPD 2024 (Rp)	Pagu RPJMD 2024 (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.293.254.239	26.592.650.000
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	990.000.000	2.300.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	560.000.000	6.280.000.320
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	70.000.000	5.700.000.000
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000	2.100.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	105.000.000	3.100.000.000
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	1.700.000.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	60.000.000,	1.800.000.000
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50.000.000	800.000.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000	1.700.000.000
Program Pengelolaan Persampahan	32.394.716.500	61.800.000.000
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	199.999.668	41.500.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendektan *top down* dan *bottom up*.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah mengakomodir forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk juga pelaksanaan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Daftar usulan kegiatan Tahun 2024 yang tercantum dari mulai tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten yang tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang diinput dalam SIPD sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Usulan Musrenbang Kecamatan Kepada DLH

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Pembinaan Bank Sampah	Desa Sirnajaya, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Sirnajaya
2	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	RW.01 s/d RW.12, Kab. Sukabumi	Cisaat	Selajambe
3	Pengadaan gerobak sampah	Rt.01 s/d Rt.36, Kab. Sukabumi	Cisaat	Selajambe
4	Pengadaan motor roda tiga	RW.01 s/d RW.12 Desa Selajambe, Kab. Sukabumi	Cisaat	Selajambe
5	Pengadaan tong sampah pilah	Kantor Desa Mekarmukti Kec. Waluran, Kab. Sukabumi	Waluran	Mekarmukti
6	Pengadaan motor roda tiga	Kedusunan I, II & III, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Langensari
7	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Cipatuguran RT 005 RW 006, Kab. Sukabumi	Palabuhanratu	Jayanti
8	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Cibatu RT. 025/RW. Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, Kab. Sukabumi	Cisaat	Cibatu
9	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Cibatu RT. 020/RW. 005 Desa Cibatu Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi	Cisaat	Cibatu

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
10	Pengadaan motor roda tiga	Wilayah desa selaawi rw.01 sampai rw.08 , Kab. Sukabumi	Sukaraja	Selawi
11	Pengadaan gerobak sampah	Desa selaawi rw.01 sampai rw.08, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Selawi
12	Pengadaan tong sampah pilah	KEDUSUNAN MANGLID (6 RT) KEDUSUNAN JABON MANGLID (4RT) KEDUSUNAN CIPANENGGAH (8RT) KEDUSUNAN CIBALAGUNG (6RT) KEDUSUNAN JOGJOGAN (6RT) KEDUSUNAN NANGKABEURIT (6 RT) KEDUSUNAN (CIKAREO 6RT), Kab. Sukabumi	Cidahu	Cidahu
13	Pengadaan gerobak sampah	Rt 001,Rt 007,Rt 009,Rt 014, Rt 016, Rt 017, Rt 019, Rt 020, Rt 021,Rt 022, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Pondokkaso Landeuh
14	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Pengkolan RT 007 RW. 002, Kab. Sukabumi	Purabaya	Purabaya
15	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Lembursitu RT. 004 RW. 001, Kab. Sukabumi	Purabaya	Purabaya
16	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Selaawi Rt 03 Rw 05, Kab. Sukabumi	Cicurug	Pasawahan
17	Pengadaan motor roda tiga	kp. jaringao rt.004/004, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
18	Pengadaan TPS Piramid	DUSUN PASIR PACAR, DUSUN PASIR TENGAH, DUSUN PASIR KALAPA, DUSUN BENTENG 1, DUSUN BENTENG 2, Kab. Sukabumi	Cicurug	Kutajaya
19	Pengadaan gerobak sampah	DUSUN PASIR PACAR, DUSUN PASIR TENGAH, DUSUN PASIR KALAPA, DUSUN BENTENG 1, DUSUN BENTENG 2, Kab. Sukabumi	Cicurug	Kutajaya
20	Pengadaan tong sampah pilah	desa sukamantri, Kab. Sukabumi	Cisaat	Sukamantri
21	Penyediaan Bangunan TPSS	PASAR CIEMAS, Kab. Sukabumi	Ciomas	Ciomas
22	Pembinaan Bank Sampah	Desa Cisaat, Kab. Sukabumi	Cicurug	Cisaat
23	Pengadaan TPS Piramid	PASAR CIEMAS, Kab. Sukabumi	Ciomas	Ciomas
24	Pengadaan motor roda tiga	Desa Mekarsari, Kab. Sukabumi	Sagaranten	Mekarsari
25	Pengadaan motor roda tiga	Di 7 Kedesunan Kp. Manglid, Kp. Jabon Manglid, Kp. CIPANENGGAH, KP. CIBALAGUNG, KP. JOGJOGAN, KP. NANGKABEURIT, KP. CIKAREO, Kab. Sukabumi	Cidahu	Cidahu
26	Pengadaan gerobak	10 RW di Desa Babakan,	Cisaat	Babakan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
	sampah	Kab. Sukabumi		
27	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Jaringao RT.004/005, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
28	Pengadaan gerobak sampah	Kp.ciheulan gtonggoh rt 04 rw 02 kedusuanan ciheulangtonggoh sebanyak 25 buah gerobak sampah , Kab. Sukabumi	Cibadak	Ciheulang Tonggoh
29	Pengadaan tong sampah pilah	Kp.Selaawi RT 004 RW 002 Desa Caringin Kulon Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 43154, Kab. Sukabumi	Caringin	Caringin Kulon
30	Pengadaan motor roda tiga	Kp.Selaawi RT 004 RW 002 Desa Caringin Kulon Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 43154, Kab. Sukabumi	Caringin	Caringin Kulon
31	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Sukasari Rt. 26 Rw. 09, Kab. Sukabumi	Cisaat	Sukasari
32	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Sukasari Rt. 28 Rw. 09, Kab. Sukabumi	Cisaat	Sukasari
33	Pengadaan tong sampah pilah	Dusun I Nangewer, Dusun II Salaawi dan Dusun III Citiis, Kab. Sukabumi	Parakansalak	Bojongasih
34	Penyediaan Bangunan TPSS	kp.toblong , Kab. Sukabumi	Ciambar	Wangunjaya
35	Pengadaan motor roda tiga	Kp.sirnagali, Kab. Sukabumi	Ciambar	Wangunjaya
36	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Bojongkopi RT. 015 RW. 003, Kab. Sukabumi	Bojonggenteng	Cibodas
37	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Sindanglengo Rt 012/002 Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	Pabuaran	Cibadak
38	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp,Nyalindung RT 001/003 Desa Munjul, Kab. Sukabumi	Ciambar	Munjul
39	Pengadaan tong sampah pilah	Di Seluruh Tingkat RW di Desa Munjul, Kab. Sukabumi	Ciambar	Munjul
40	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Dalima RW.006, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
41	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Gunungjaya RT 03/01, RT 08/02, RT 10/02, RT 15/03 KP. Cikaroya RT 20/04, RT 23/04 Kp. Cicadas RT 28/05, RT 29/06, Kab. Sukabumi	Cisaat	Gunungjaya
42	Pengadaan motor roda tiga	KP.Gunungjaya RT.15/03, Kab. Sukabumi	Cisaat	Gunungjaya
43	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Cibolangkaler Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	Cisaat	Cibolang Kaler
44	Pengadaan gerobak	Kp. Bojongsari, Kp Gobang,	Ciambar	Cibunarjaya

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
	sampah	Kp. Gobang Tonjong, Kp Ciwarung, Kp Babakan Gobang, KP. Selaawi Hilir, Kp. Selaawi girang, Kp Langkob, Kp. Warung Gombong Kp. Ngelasari Kp. Barurata dan Perum Mayanti Residence, Kab. Sukabumi		
45	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Palasari Rt.001 Rw.001, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Palasari Girang
46	Penyediaan Bangunan TPSS	PASAR CIEMAS DESA CIEMAS, Kab. Sukabumi	Ciomas	Ciomas
47	Pembinaan Bank Sampah	Desa Girijaya, Kab. Sukabumi	Cidahu	Girijaya
48	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Desa girijaya, Kab. Sukabumi	Cidahu	Girijaya
49	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Padepokan girijaya Rt. 010 rw. 004, Kab. Sukabumi	Cidahu	Girijaya
50	Pengadaan motor roda tiga	Kp.cisarua RT 01/04, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Cisarua
51	Pengadaan motor roda tiga	Kp Tangkolo Rt 003 Rw 004, Kab. Sukabumi	Cikidang	Sampora
52	Penyediaan Bangunan TPSS	Perum Bukit Randu Asri RT.07 RW.022, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
53	Penyediaan Bangunan TPSS	Dusun Gentong, Dusun Kabandungan dan Dusun Pasir Halang, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
54	Pengadaan TPS Piramid	Dusun Gentong, Dusun Kabandungan dan Dusun Pasir Halang, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
55	Pengadaan tong sampah pilah	Kantor Desa Langensari, SDN Langensari, SDN Pasirhalang 2, PAUD Melati 1 Dan Paud Alkautsar, Paud Mawar, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
56	Pengadaan gerobak sampah	Dusun Gentong, Dusun Kabandungan dan Dusun Pasir Halang, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
57	Pengadaan motor roda tiga	Dusun Gentong, Dusun Kabandungan dan Dusun Pasir Halang Dusun Cipaku, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
58	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Suningar Rt 03 Rw 08 Dusun Nangela, Kab. Sukabumi	Jampangtengah	Jampangtengah
59	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Pasirangin Rt 003 Rw 008 Dusun Nangela, Kab. Sukabumi	Jampangtengah	Jampangtengah
60	Pembinaan Bank Sampah	Kp Cikupa rt/rw 05/03, Kab. Sukabumi	Cisolok	Cikelat
61	Pengadaan gerobak	Jl. Swadarma KM 01- RT 12	Kadudampit	Sukamaju

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
	sampah	RW 05, Kab. Sukabumi		
62	Pengadaan tong sampah pilah	Jl. swadarma KM 01 - RT 12 RW 05, Kab. Sukabumi	Kadudampit	Sukamaju
63	Pengadaan gerobak sampah	Kp. jaringao RT.004/004, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
64	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Babakan Cirumput RW 007 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Bojongsawah
65	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Kp. palayangan rt 001/001 Desa sukamanah Kecamatan cimanggu, Kab. Sukabumi	Cimanggu	Sukamanah
66	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Babakan Khoer RW 013 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Bojongsawah
67	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Nagrak rt 004/008, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Cisarua
68	Pengadaan gerobak sampah	Perumahan Bukit Randu Asri Rw. 022 Kelurahan Cibadak, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
69	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Margaluyu Rt. 006/004 Desa Cimaja, Kab. Sukabumi	Cikakak	Cimaja
70	Pengadaan motor roda tiga	Desa Sukamulya Kecamatan Caringin untuk semua kedesun, Kab. Sukabumi	Caringin	Sukamulya
71	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Cijengkol RT 001 RW 005 Desa Cijengkol (Jl. Kadupugur-Cijengkol KM 2,5), Kab. Sukabumi	Caringin	Cijengkol
72	Pengadaan motor roda tiga	Kantor Desa Mekarmukti, Kab. Sukabumi	Waluran	Mekarmukti
73	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Cijengkol RT 001 RW 005 (Jl. Kadupugur-Cijengkol KM 2,5), Kab. Sukabumi	Caringin	Cijengkol
74	Pengadaan gerobak sampah	- Desa Cikembang - 4 Kedesun, Kab. Sukabumi	Caringin	Cikembang
75	Pengadaan TPS Piramid	Desa Warnasari RW 01. RW 02. RW 03. RW 04. RW 05, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Warnasari
76	Pengadaan gerobak sampah	Desa Pasirbaru, Kab. Sukabumi	Cisolok	Pasir Baru
77	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Selaerih RT 008 RW 002, Kab. Sukabumi	Jampangkulon	Ciparay
78	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Selaerih RT 008 RW 002, Kab. Sukabumi	Jampangkulon	Ciparay
79	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Cibaregbeg RW 002, Kab. Sukabumi	Cicurug	Caringin
80	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Tanjungsari Jalan Puncakmanis Km 03 , Kab. Sukabumi	Curugkembar	Tanjungsari
81	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Tanjungsari jln. Puncakmanis Km 03, Kab.	Curugkembar	Tanjungsari

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
		Sukabumi		
82	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Tanjungsari Km 03, Kab. Sukabumi	Curugkembar	Tanjungsari
83	Pengadaan tong sampah pilah	Kadus Batununggul 6 RT Kadus Cipanali 6 RT Kadus Jatiwangi 5 RT Kadus Ciranjang sawah 5 RT, Kab. Sukabumi	Cimanggu	Karangmekar
84	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Karangmekar, Kab. Sukabumi	Cimanggu	Karangmekar
85	Pengadaan gerobak sampah	Kp Sampora Rt 002 Rw 005, Kab. Sukabumi	Cikidang	Sampora
86	Pengadaan gerobak sampah	Kp Sampora Rt 002 Rw 005, Kab. Sukabumi	Cikidang	Sampora
87	Pengadaan gerobak sampah	Kp Sampora Rt 003 Rw 005, Kab. Sukabumi	Cikidang	Sampora
88	Penyediaan Bangunan TPSS	Desa Cikembar, Kab. Sukabumi	Cikembar	Cikembar
89	Pengadaan gerobak sampah	Desa Cikembar, Kab. Sukabumi	Cikembar	Cikembar
90	Penyediaan Bangunan TPSS	Tiap RW di Desa Ciambar, Kab. Sukabumi	Ciambar	Ciambar
91	Pengadaan tong sampah pilah	Pasar Kamis Cibarengkok, Kab. Sukabumi	Cidadap	Cidadap
92	Pembinaan Bank Sampah	Para Pegiat Masyarakat sadar Kebersihan Desa Cicantayan, Kab. Sukabumi	Cicantayan	Cicantayan
93	Pengadaan tong sampah pilah	Dusun Batununggul, Dusun Cipanali, Dusun, Jatiwangi, Dusun Ciranjangsawah, Kab. Sukabumi	Cimanggu	Karangmekar
94	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Cimangkok, Kp. Manglid, Kp. Panarosan, Kp. Cimanggu, Kab. Sukabumi	Sukalarang	Cimangkok
95	Pengadaan tong sampah pilah	Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Sukabumi	Jampangkulon	Bojonggenteng
96	Pengadaan gerobak sampah	Kp Cujawa RT 30,32 RW 07 Kp Cimanggis RT 07 RW 02, Kab. Sukabumi	Waluran	Mangunjaya
97	Pengadaan tong sampah pilah	DUSUN CIRANCA DAN DUSUN PASIRPANJANG DESAPASIRPANJANG KEC, CIRACAP, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pasirpanjang
98	Pengadaan gerobak sampah	DUSUN CIRANCA DAN DUSUN PASIRPANJANG KEC. CIRACAP, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pasirpanjang
99	Pengadaan motor roda tiga	DUSUN CIRANCA DAN DUSUN PSIRPANJANG DESA PASIRPANJANG KEC. CIRACAP, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pasirpanjang
100	Pengadaan motor roda tiga	Desa Cikembar, Kab. Sukabumi	Cikembar	Cikembar
101	Pengadaan motor roda tiga	Desa Cibenda, Kab. Sukabumi	Ciemas	Cibenda
102	Pengadaan motor roda tiga	Jalan Pelabuhan II KM 9 Kp Pasirmalang RT 003/003,	Gunungguruh	Kebonmanggu

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
		Kab. Sukabumi		
103	Pengadaan tong sampah pilah	Kp Padaraang RT 001/011, Kab. Sukabumi	Gunungguruh	Kebonmanggu
104	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Sinarbakti Rt.004 Rw.001, Kab. Sukabumi	Tegalbuleud	Buniasih
105	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Caringin Rt. 002 / 006, Kab. Sukabumi	Cicurug	Nyangkowek
106	Pengadaan gerobak sampah	Se-Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Sasagaran
107	Pengadaan tong sampah pilah	Desa sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Sasagaran
108	Pengadaan tong sampah pilah	Desa sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Sasagaran
109	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Sinagar RT. 14 RW. 15, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Gunungendut
110	Pengadaan motor roda tiga	Kp. sukamaju. RT. 001/001, Kab. Sukabumi	Ciemas	Mandrajaya
111	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Sukamaju RT. 001/001, Kab. Sukabumi	Ciemas	Mandrajaya
112	Pengadaan tong sampah pilah	1. Kp. Sukamaju Rt. 001/001 (1 Unit di sekitar Kantor Desa) 2. Kp. Cikadal RT. 001/002 (5 Unit Di pesisir Pantai cikadal), Kab. Sukabumi	Ciemas	Mandrajaya
113	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Sukamaju RT. 001/001 (1 Unit Disekitar Kantor Desa), Kp Cikadal RT. 002/002 (5 Unit Dipesisir Pantai Cikadal), Kab. Sukabumi	Ciemas	Mandrajaya
114	Pengadaan motor roda tiga	Desa Sukaharja, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Sukaharja
115	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Cikadal RT. 001/002, Kab. Sukabumi	Ciemas	Mandrajaya
116	Pembinaan Bank Sampah	Kp. jaringao RT.004/004, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
117	Pengadaan gerobak sampah	Desa Sukaraja, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Sukaraja
118	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Sukaraja, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Sukaraja
119	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Sukamantri RT 16/06, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Kalapanunggal
120	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Cicurug Rt 008/003 Desa Cikembang, Kab. Sukabumi	Caringin	Cikembang
121	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Cikondang RT 001/001, Kab. Sukabumi	Surade	Sukatani
122	Pembinaan Bank Sampah	Desa Seuseupan, Kab. Sukabumi	Caringin	Seuseupan
123	Pengadaan gerobak sampah	Desa Seuseupan, Kab. Sukabumi	Caringin	Seuseupan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
124	Pengadaan gerobak sampah	Desa Seuseupan, Kab. Sukabumi	Caringin	Seuseupan
125	Pengadaan motor roda tiga	Desa Seuseupan, Kab. Sukabumi	Caringin	Seuseupan
126	Pengadaan tong sampah pilah	Jl. Raya Nagrak No 54, Kab. Sukabumi	Nagrak	Nagrak Utara
127	Pengadaan motor roda tiga	Desa Selawangi, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Selawangi
128	Pengadaan gerobak sampah	Desa Selawangi, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Selawangi
129	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Sinagar RT. 14 RW. 15, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Gunungendut
130	Pengadaan tong sampah pilah	Fasilitas Umum, Kab. Sukabumi	Cicantayan	Cimahi
131	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Genteng rw 006 dan kp lembur sawah. Rw 001 dan Rw. 003, Kab. Sukabumi	Cicantayan	Lembursawah
132	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Cikepuh Rt 02 Rw 03 Desa Bantargebang, Kab. Sukabumi	Bantargadung	Bantargebang
133	Pengadaan gerobak sampah	Wilayah 4 kedsunan, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Karawang
134	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jalan Raya Paledang No 171, Kab. Sukabumi	Cicantayan	Cimahi
135	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Srigalih RT. 006 RW. 002, Kab. Sukabumi	Purabaya	Purabaya
136	Pengadaan tong sampah pilah	Kp.Nutug 25/09, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Kalapanunggal
137	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Nutug RT 24/09, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Kalapanunggal
138	Pengadaan tong sampah pilah	Kp. Sukamantri RT 14/06, Kab. Sukabumi	Kalapanunggal	Kalapanunggal
139	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Waluran Mandiri, Kab. Sukabumi	Waluran	Waluran Mandiri
140	Pengadaan tong sampah pilah	Kantor Desa Waluran Mandiri, Kab. Sukabumi	Waluran	Waluran Mandiri
141	Pengadaan TPS Piramid	Kp. Panagan RT 001 RW 009, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Sukaharja
142	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Sekarwangi RT.003 Rw.017, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
143	Pengadaan motor roda tiga	Kp.tegal panjang rw 003 dan rw 005, Kab. Sukabumi	Cikembar	Sukamaju
144	Pengadaan gerobak sampah	Kp.Selaeurih RT 008 RW 002, Kab. Sukabumi	Jampangkulon	Ciparay
145	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Ciparay RT 008 RW 004, Kab. Sukabumi	Jampangkulon	Ciparay
146	Pengadaan motor roda tiga	Desa Talaga, Kab. Sukabumi	Caringin	Talaga
147	Pengadaan motor roda tiga	Kp. Cibuntu rt 017 rw 004, Kab. Sukabumi	Simpenan	Cibuntu
148	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Talaga, Kab. Sukabumi	Caringin	Talaga
149	Penyediaan Bangunan TPSS	Dusun 1-4 Desa cimanggu palabuhanratu, Kab.	Palabuhanratu	Cimanggu

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
		Sukabumi		
150	Pembinaan Bank Sampah	Desa Bojongkokosan, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Bojongkokosan
151	Pengadaan tong sampah pilah	Setiap Kedusunan di Tempat Umum, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Bojongkokosan
152	Pengadaan motor roda tiga	Desa Babakanjaya, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Babakanjaya
153	Penyediaan Bangunan TPSS	Desa kompa, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Kompa
154	Pengadaan motor roda tiga	Desa kompa, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Kompa
155	Pengadaan gerobak sampah	Desa kompa, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Kompa
156	Pengadaan motor roda tiga	Desa Bojongkokosan, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Bojongkokosan
157	Penyediaan Bangunan TPSS	DUSUN 2 KP. NEGLASARI RT. 02 / 04, Kab. Sukabumi	Parakansalak	Parakan Salak
158	Pengadaan gerobak sampah	Desa Bojongkokosan, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Bojongkokosan
159	Pengadaan motor roda tiga	Kelurahan Surade, Kab. Sukabumi	Surade	Surade
160	Pengadaan gerobak sampah	7 RW se – Desa Parungkuda, Kab.Sukabumi	Parungkuda	Parungkuda
161	Pengadaan motor roda tiga	Dusun Bojongmalang Kp. Cigombong RW 008, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Warungkiara
162	Pengadaan motor roda tiga	Kp.Pada Asih Rt 002 Rw 001, Kab. Sukabumi	Simpenan	Mekarasih
163	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Desa caringin wetan, Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi	Caringin	Caringin Wetan
164	Pengadaan motor roda tiga	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4, Kab. Sukabumi	Palabuhanratu	Cikadu
165	Pembinaan Bank Sampah	Desa Sukamanis, Kab. Sukabumi	Kadudampit	Sukamanis
166	Pengadaan motor roda tiga	Dusun Cisarua, Kab. Sukabumi	Kadudampit	Sukamanis
167	Pengadaan motor roda tiga	Desa Cikaret, Kab. Sukabumi, Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Cikaret
168	Pengadaan tong sampah pilah	Di Kedusunan I Bojonggaling, Dusun II Cijagung, Dusun III Bihbul, Dusun IV Pangkalan, Kab. Sukabumi	Bantargadung	Bojonggaling
169	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp.Cijoglo Rt 03/06, Kab. Sukabumi	Parakansalak	Sukatani
170	Pengadaan tong sampah pilah	Kedusunan Manglid (6 RT) Kedusunan Jabon Manglid (4RT) Kedusunan Cipanengah (8RT) Kedusunan Cibalagung (6RT) Kedusunan Jogjogan (6RT) Kedusunan Nangkabeurit (6 RT) Kedusunan (Cikareo 6 RT), Kab. Sukabumi Kab.	Cidahu	Cidahu

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
		Sukabumi		
171	Pengadaan motor roda tiga	"Di 7 Kedusunan Kp. Manglid, Kp. Jabon Manglid, Kp. Cipanengah, Kp. Cibalagung, Kp. Jogjogan Kp. Nangkabeurit, Kp. Cikareo, Kab. Sukabumi "Kab. Sukabumi	Cidahu	Cidahu
172	Pengadaan motor roda tiga	Desa Bojongsari, Kab. Sukabumi	Nyalindung	Bojongsari
173	Pengadaan gerobak sampah	Tersebar Di Kedusunan I Bojonggaling, Dusun II Cijagung, Dusun III Bihbul dan Dusun IV Pangkalan, Kab. Sukabumi	Bantargadung	Bojonggaling
174	Penyediaan Bangunan TPSS	desa parakansalak Dusun 2, Kab. Sukabumi	Parakansalak	Parakan Salak
175	Pengadaan motor roda tiga	Tersebar Di Ke Empat Kedusunan Yaitu Dusun I Bojonggaling, Dusun II Cijagung, Dusun III Bihbul, Serta Dusun IV Pangkalan, Kab. Sukabumi	Bantargadung	Bojonggaling
176	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp citalahab RT 004 RW 003, Kab. Sukabumi	Nyalindung	Nyalindung
177	Pengadaan TPS Piramid	Kp. Bojongringkung Rt 03 Rw 01 Desa Sasagaran Kec. Kebonpedes Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Sasagaran
178	Pengadaan motor roda tiga	Kantor Desa Girijaya, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Girijaya

Usulan kegiatan Tahun 2024 yang sudah diinput dalam SIPD, disaring Kembali sesuai skala prioritas yang ditetapkan Kecamatan dan diverifikasi melalui Musrenbang. Hasil verifikasi Musrenbang secara skala prioritas usulan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Usulan Musrenbang Kecamatan Kepada DLH

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Cipatuguran RT 005 RW 006, Kab. Sukabumi	Palabuhanratu	Jayanti
2	Pengadaan motor roda tiga	wilayah desa selaawi rw. 01 sampai rw. 08 , Kab. Sukabumi	Sukaraja	Selawi
3	Pengadaan tong sampah pilah	Kedusunan manglid (6 rt), Kedusunan jabon manglid (4 rt), Kedusunan cipanengah (8 rt), Kedusunan cibalagung (6 rt), Kedusunan jogjogan (6 rt), Kedusunan nangkabeurit (6 rt), Kedusunan (cikareo 6 rt),	Cidahu	Cidahu

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
		Kab. Sukabumi		
4	Pengadaan gerobak sampah	Rt 001,Rt 007,Rt 009,Rt 014, Rt 016, Rt 017, Rt 019, Rt 020, Rt 021,Rt 022, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Pondokkaso Landeuh
5	Pengadaan motor roda tiga	Kp. jaringao rt.004/004, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
6	Pengadaan gerobak sampah	Dusun Pasir Pacar Dusun Pasir Tengah Dusun Pasir Kalapa Dusun Benteng 1 Dusun Benteng 2, Kab. Sukabumi	Cicurug	Kutajaya
7	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Jaringao RT.004/005, Kab. Sukabumi	Ciracap	Pangumbahan
8	Pengadaan gerobak sampah	Kp. Dalima RW.006, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
9	Penyediaan Bangunan TPSS	PASAR CIEMAS DESA CIEMAS, Kab. Sukabumi	Ciomas	Ciomas
10	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Padepokan girijaya Rt. 010 rw. 004, Kab. Sukabumi	Cidahu	Girijaya
11	Pengadaan TPS Piramid	Dusun Gentong, Dusun Kabandungan dan Dusun Pasir Halang, Kab. Sukabumi	Sukaraja	Langensari
12	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Pasirangin Rt 003 Rw 008 Dusun Nangela, Kab. Sukabumi	Jampangtengah	Jampangtengah
13	Pengadaan gerobak sampah	Jl. Swadarma KM 01- RT 12 RW 05, Kab. Sukabumi	Kadudampit	Sukamaju
14	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	kp. palayangan rt 001/001 Desa sukamanah kecamatan cimanggu, Kab. Sukabumi	Cimanggu	Sukamanah
15	Pengadaan gerobak sampah	Kp Sampora Rt 002 Rw 005, Kab. Sukabumi	Cikidang	Sampora
16	Pengadaan gerobak sampah	Desa Cikembar, Kab. Sukabumi	Cikembar	Cikembar
17	Pengadaan tong sampah pilah	Kp.Cimangkok,Kp.Manglid,Kp.Pana rosan,Kp.Cimanggu, Kab. Sukabumi	Sukalarang	Cimangkok
18	Pengadaan motor roda tiga	Jalan Pelabuhan II KM 9 Kp Pasirmalang RT 003/003, Kab. Sukabumi	Gunungguruh	Kebonmanggu
19	Pengadaan motor roda tiga	Desa Sukaharja, Kab. Sukabumi	Warungkiara	Sukaharja
20	Pengadaan gerobak sampah	Wilayah 4 kedusunan, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Karawang
21	Pembinaan Bank Sampah	Kp. Srigalih RT. 006 RW. 002, Kab. Sukabumi	Purabaya	Purabaya
22	Pengadaan tong sampah pilah	Desa Waluran Mandiri, Kab. Sukabumi	Waluran	Waluran Mandiri
23	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp. Sekarwangi RT.003 Rw.017, Kab. Sukabumi	Cibadak	Cibadak
24	Pengadaan motor	Desa Babakanjaya, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Babakanjaya

No	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
	roda tiga			
25	Pengadaan gerobak sampah	desa kompa, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Kompa
26	Pengadaan gerobak sampah	Desa Bojongkokosan, Kab. Sukabumi	Parungkuda	Bojongkokosan
27	Pengadaan motor roda tiga	Kelurahan Surade, Kab. Sukabumi	Surade	Surade
28	Pengadaan motor roda tiga	Kp.Pada Asih Rt 002 Rw 001, Kab. Sukabumi	Simpenan	Mekarasih
29	Penyediaan Bangunan TPSS	Kp citalahab RT 004 RW 003, Kab. Sukabumi	Nyalindung	Nyalindung
30	Pengadaan TPS Piramid	Kp.Bojongringkung Rt 03 Rw 01 Desa Sasagaran Kec.Kebonpedes Kab.Sukabumi , Kab. Sukabumi	Kebonpedes	Sasagaran

Secara umum usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakomodir dengan catatan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan memungkinkan atau tidaknya usulan tersebut dilaksanakan dari segi persyaratan yang ditentukan, misalnya ketersediaan lahan, ketersediaan pengelola baik perorangan dan kelompok serta cakupan wilayah pelayanan pengangkutan sampah. Selain itu yang menjadi pertimbangan juga berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan prioritasnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah : (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; (3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; (4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah

Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan upaya mencapai VISI '**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**', MISI ke-tiga, yaitu: '**Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah**', Tujuan 2 "**Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan**", dan Sasaran 1 dan 2 "**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat**", menjadi panduan bagi urusan pemerintahan lingkungan hidup serta menjadi acuan utama Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.

Tabel 8. Kebijakan Provinsi Jawa Barat Urusan Lingkungan Hidup

VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI				
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas air dan udara (T1)	1. Meningkatkan kualitas air (S1.1)	Bidang Tata Kelola Lingkungan
				Bidang Pengendalian Pencemaran
				Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim
		2. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik (T2)	2. Meningkatkan kualitas udara (S1.2)	Bidang Penataan Hukum Lingkungan
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
				UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional
		3. Terwujudnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran (T3)	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik (S2)	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
				Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim
				UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional
		3. Terwujudnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran (T3)	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran (S3)	Kesekretariatan
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
				UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas air dan udara (T1)	Meningkatnya kualitas air (S1.1)	Indikator 1.1 (11.1 dalam point): Indeks Kualitas Air (IKA)	42,07	36,2	42,47	42,67	42,87	43,07	43,27
		Meningkatnya kualitas udara (S1.2)	Indikator 1.2 (11.2. dalam point): Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,91	72,8	79,31	79,51	79,71	79,91	80,11
2	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik (T2)	Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik (S2)	Indikator 2 (12 dalam percent): Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	NA	NA	0,62	6,07	12,21	12,23	15,80
3	Terwujudnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran (T3)	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran (S3)	Indikator 3 (13 dalam percent): Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100	100	100	100	100	100	100

3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 Yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**, Misi ke-2 Bupati Sukabumi Periode 2021-2026 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan**. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya pengelolaan sampah

Tabel 7. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja DLH Tahun 2024 berdasarkan Renstra 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	68,11
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah Pada Wilayah Yang Ditangani	persen	62,40

3.4 Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merencanakan 12 program dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi melalui pencapaian target kinerja sasaran yang tertuang dalam tahapan Rencana Strategis DLH Tahun 2021-2026. Rencana Program yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Penunjang

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- j. Program Pengelolaan Persampahan

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- a. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Dalam mendukung kebijaksanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagai landasan operasional bagi para *stakeholders* Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi, rincian program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<u>Kegiatan</u>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<u>Kegiatan</u>
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<u>Kegiatan</u>
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
<u>Kegiatan</u>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<u>Kegiatan</u>
Administrasi Umum Perangkat Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<u>Kegiatan</u>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel
<u>Kegiatan</u>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<u>Kegiatan</u>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
<u>Kegiatan</u>
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
<u>Kegiatan</u>
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
<u>Kegiatan</u>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<u>Kegiatan</u>
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
<u>Kegiatan</u>
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pelaksanaan rehabilitasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
<u>Kegiatan</u>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
<u>Kegiatan</u>
Penyimpanan Sementara Limbah B3
<u>Sub Kegiatan</u>
Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
<u>Kegiatan</u>
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin

PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
<u>Kegiatan</u>
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
<u>Sub Kegiatan</u>
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<u>Kegiatan</u>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<u>Kegiatan</u>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
<u>Kegiatan</u>
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
<u>Kegiatan</u>
Pengelolaan Sampah
<u>Sub Kegiatan</u>
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penanganan sampah melalui pengangkutan
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
<u>Kegiatan</u>
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
<u>Sub Kegiatan</u>
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH

Rencana kerja tahun 2024 tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa Sub Kegiatan mengalami pemutakhiran. Hasil Pemutakhiran dapat dilihat dalam Lampiran.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang dalam Renja bersifat indikatif, sehingga seluruh data dan informasi baik sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renja merupakan indikasi yang ingin dicapai. Sumber pendanaan Program yang merupakan urusan Lingkungan Hidup yang direncanakan Tahun 2024 berdasarkan sumber dana Tahun 2023 yang sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk menu Pengadaan Armada Angkutan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena merupakan lokasi prioritas DAK tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, menu yang diusulkan yaitu Pengelolaan Sampah Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Seluruh program dan kegiatan prioritas dalam Renja DLH Tahun 2024 telah diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini untuk memastikan proses perencanaan agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						54.872.970.407,00							5.142.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						199.999.668,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						199.999.668,00							0,00	
1.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	199.999.668,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	199.999.668,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				8 Ton/hari	0,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	199.999.668,00	- Kab. Sukabumi, Cikembar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.672.970.739,00							5.142.500.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						54.672.970.739,00							5.142.500.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	20.293.254.239,00						-	122.500.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	122.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	107.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	15.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.385.555.739,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	8.370.555.739,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	329.900.800,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	299.900.800,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	420.056.500,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	118.100.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	53.000.500,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	78.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.750.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	136.206.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	54.648.000,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	45.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	9.648.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.105.943.200,00			-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	195.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Citepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	9.910.943.200,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	902.150.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				23 Unit	618.310.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverme nt dan kualitas pelayanan publik	Aparatur	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	122.440.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.050.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	101.200.000,00	- Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	50.150.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	990.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	140.000.000,00			-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	100.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	850.000.000,00			-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	2.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	2.400.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	250.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	560.000.000,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	270.000.000,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				34 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KE HUTANAN-PENGUSAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				650 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lingkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>				10 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				5 Titik	35.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	220.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	200.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	70.000.000,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				50 Orang	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkata n kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lin gkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lin gkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	105.000.000,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.000.000,00			-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				75 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				75 Badan Usaha	55.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				3 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	60.000.000,00						-	0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				9 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				25 Pengaduan	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	32.394.716.500,00						-	2.020.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	32.394.716.500,00			-	Peningkata n kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lin gkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur	-	2.020.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	25.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lin gkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				497 Unit	5.640.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkata n kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Lin gkungan)	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				677,62 Ton	10.541.290.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KE HUTANAN-PEN UGASAN-LINGK UNGAN HIDUP	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	770.600.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan Industri Pariwisata bertaraf int ernasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1 Ton	15.219.744.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				250 Ton	198.082.500,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan	Masyarakat, stakeholder, aparatur	20.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis sebagai landasan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 yang berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditentukan serta mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen seluruh unsur stakeholder yang terlibat.

Palabuhanratu, 21 Juli 2023

KEPALA,

I. H. TEJA SUMIRAT, M.M
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19660330 199303 2 002

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN INPUT DATA PEMUTAKHIRAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PADA SIPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN LAMA	SUB KEGIATAN BARU SETELAH PEMUTAKHIRAN	PAGU DARI SUB KEGIATAN LAMA (RP)	KETERANGAN/PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100,000,000	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	300,000,000	
3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	250,000,000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pelaksanaan rehabilitasi	200,000,000	
5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-	55,000,000	
6	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat-	20,000,000	
7	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota-	50,000,000	
8	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-	190,800,000	Semula Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Rp. 190.800.000; Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp. 6.150.000.000; dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp. 35.250.000.000, setelah pemutakhiran menjadi beberapa Kegiatan, menjadi sbb: 1) Penanganan sampah melalui pengangkutan Rp. 10.541.290.000 2) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp. 770.600.000 3) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Rp. 198.082.500 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp. 5.640.000.000 5) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Rp. 15.219.744.000
9	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan sampah melalui pengangkutan	6.150.000.000	
10		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		
11		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		